



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN
KEPEGAWAIAN (SAPK) DALAM PENGURUSAN DOKUMEN
KEPEGAWAIAN PADA KANTOR REGIONAL XII BKN
PEKANBARU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH

VENTICA CARDEA

11775200939

PROGRAM S1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN
KEPEGAWAIAN (SAPK) DALAM PENGURUSAN DOKUMEN
KEPEGAWAIAN PADA KANTOR REGIONAL XII BKN
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Jurusan Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

VENTICA CARDEA

11775200939

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021

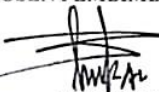
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : VENTICA CARDEA
NIM : 11775200939
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Pengurusan Dokumen Kepegawaian Pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru


**DISETUJUI OLEH :
DOSEN PEMBIMBING**


Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
NIK. 130 712 075

MENGETAHUI :

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA JURUSAN
Ilmu Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : VENTICA CARDEA
NIM : 11775200939
JURUSAN : Ilmu Administrasi Negara
FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK) Dalam Pengurusan Dokumen
Kepegawaian Pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
TANGGAL UJIAN : 22 September 2021

Disetujui oleh :

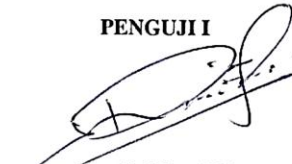
KETUA PENGUJI



Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

Mengetahui :

PENGUJI I



Rusdi, S.Sos, MA
NIP. 19720906 200710 1 002

PENGUJI II



Irdavanti, S.P, MA
NIK. 130 411 030

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN PADA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Oleh :

Ventica Cardea
NIM. 11775200939

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebagai salah satu instansi yang menerapkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam pengurusan dokumen kepegawaian. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam pengurusan dokumen kepegawaian dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Kemudian Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi serta penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman. Dalam menganalisis efektivitas penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam pengurusan dokumen kepegawaian pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru menggunakan teori dari Wukil Ragil yaitu PIECES (*Performance, Information, Economy, Control, Eficiency and Service*) dengan 12 sub indikator. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam pengurusan dokumen kepegawaian pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru secara keseluruhan sudah efektif dari segi kinerja, informasi, biaya, kontrol, efisien dan layanan. Tidak hanya itu penulis juga dapat mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) ini. Namun dari beberapa indikator tersebut penulis menemukan beberapa masalah sehingga diperlukannya pengembangan lebih lanjut pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Kata Kunci : *Efektivitas, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaiaan (SAPK), Pengurusan Dokumen Kepegawaian*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah menghimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga masih diberi nikmat dan kesehatan, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan semua pengikutnya yang setia mengikuti ajaran dan semua nya hingga akhir zaman, Aamiin Yaa Robbal Aalamiin. Seiring dengan itu, dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Pengurusan Dokumen Kepegawaian Pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru”**, yang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat lulus dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar sarjana.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendo'akan, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah :

1. Kedua Orang tua tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta sebagai *support system* dalam memberi semangat dan memberikan nasehat kepada penulis yakni Ayahanda Ismed dan Ibunda Nelly Rosma Dewita, serta adik ku yang tersayang Claudio Nesta dan Armagentha Nesta
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Ibu Dr. Mahyarni, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 4. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
 6. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, nasehat, dan ilmu serta meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini
 7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat, arahan dan motivasi kepada penulis sejak memasuki perkuliahan
 8. Seluruh ibu/bapak Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis
 9. Bapak/Ibu Pegawai Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat melakukan wawancara serta telah bersedia memberikan data – data dan informasi mengenai penelitian ini
 10. Semua teman – teman yang telah terlibat dan tidak bisa disebut satu per satu. Terima kasih telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan juga yang tidak henti – hentinya memberi motivasi
 11. Terakhir dan tidak kalah pentingnya, saya ingin berterimakasih untuk diri saya sendiri, terimakasih untuk tetap percaya pada diri sendiri, terimakasih untuk kerja keras yang telah saya lakukan, terimakasih untuk diri saya yang tidak pernah putus asa, dan terimakasih telah berjuang hingga sampai saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Sehingga kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini kedepan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Wassalammu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 08 Agustus 2021

Ventica Cardea



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5 Subjek dan Objek Penelitian	49
3.6 Teknik Analisa Data.....	51

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Lokasi Penelitian.....	53
4.2 Gambaran Umum Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.....	53

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Pengurusan Dokumen Kepegawaian	74
5.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Pengurusan Dokumen Kepegawaian	123

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	126
6.2 Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

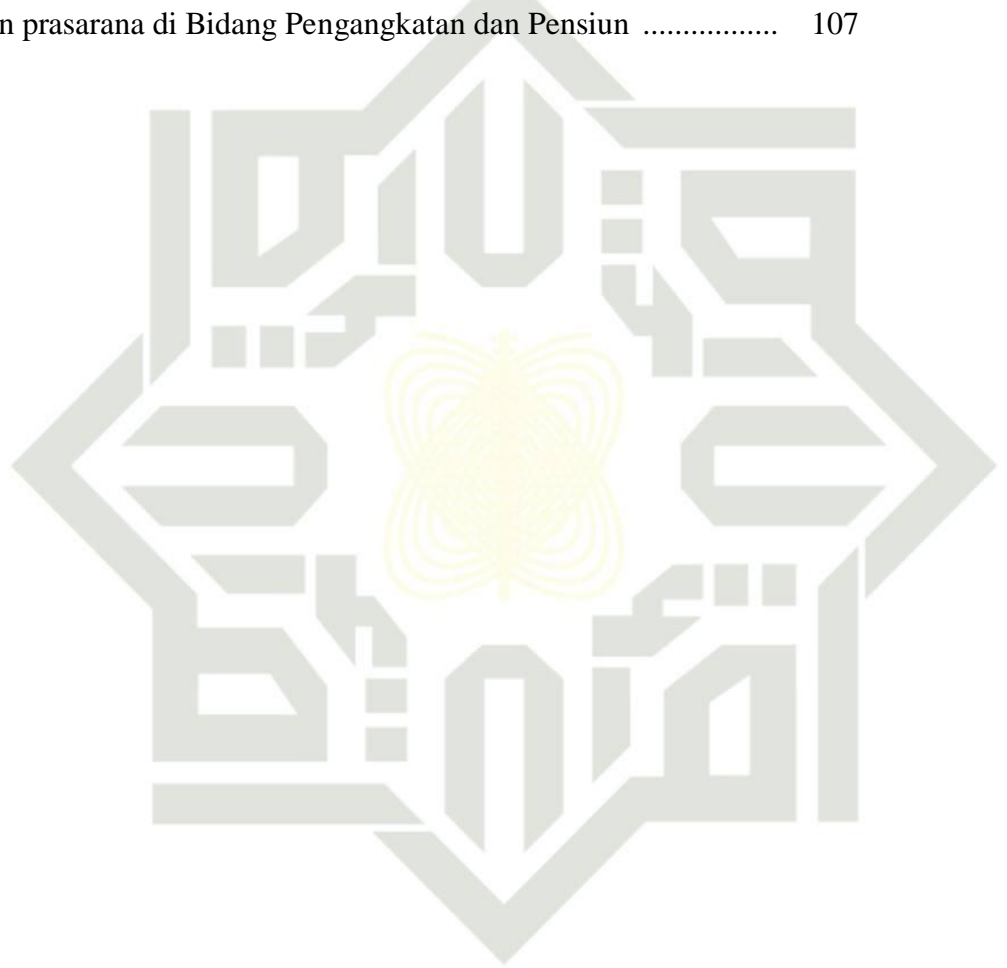
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

1.	Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	6
1.	Usulan Mauk Penetapan NIP CPNS Periode 2018-2019	7
2.	Indikator Penelitian	43
3.	Key Informan Penelitian.....	50
4.	Rekapitulasi PNS Pada Kantor Regional XII Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Per Juni 2021	68
4.	Rekapitulasi Jumlah PNS pada Kantor Regional XII Berdasarkan Golongan Per Juni 2021	69
4.	Rekapitulasi PNS Pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Jabatan Per Juni 2021	70
5.1	Persentase Penyelesaian Penetapan NIP Tahun 2018-2020	79
5.2	Durasi Penyelesaian Data Kepegawaian per berkas Pada Tahun 2015-2020	84
5.3	Persentase data Kepegawaian yang akurat, valid dan terkini Tahun 2015-2020	89
5.4	Informasi/Output Laporan Penetapan CPNS Formasi Tahun 2019	91
5.5	Jumlah Usulan Masuk pada Bidang Pengangkatan dan Pensiun Serta Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Periode Tahun 2020.....	102
5.	Jumlah Personil pada Bidang Pengangkatan dan Pensiun Serta Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian.....	103
5.	Daftar Fasilitas yang digunakan oleh Bidang Pengangkatan dan Pensiun	107
5.	Indeks Kepuasan Instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian Pada Tahun 2015-2020.....	116
5.	Monitoring Penyelesaian Penetapan NIP CPNS 2018	120

DAFTAR GAMBAR

4.	Struktur Organisasi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	64
5.	Tampilan Pencarian Data PNS pada SAPK	76
5.	Tampilan Klasifikasi Informasi Data PNS Pada SAPK	87
5.	Menu Login Utama Profil Pengguna SAPK	98
5.	Menu Login Utama Profil Pengguna MYSAPK	98
5.	Sarana dan prasarana di Bidang Pengangkatan dan Pensiun	107



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang cepat dan informasi yang semakin mudah diakses menuntut instansi pemerintah untuk semakin lebih baik dalam penggunaan teknologi dan informasi, tentunya hal ini akan membantu para pelaku pelayanan publik dalam melakukan pekerjaannya dalam hal kegiatan administrasi, pelayanan, pengolahan data kepegawaian, maupun pengurusan dokumen kepegawaian. Menurut Wasiah Sufi dan Dwi Herlinda (2017) Di era saat ini, pemerintah memerlukan suatu sistem yang dapat mempermudah pekerjaan para pelayanan publik sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan manajemen, seperti sistem informasi manajemen. Dengan didukungnya sistem informasi manajemen dengan menggunakan teknologi yang tepat guna, maka kebutuhan informasi yang akurat dapat terpenuhi. Kemudian menurut Vivi Sahfitri (2012) dengan penggunaan sistem informasi pada suatu instansi bertujuan untuk memudahkan tugas pengguna (*user*) sehingga dapat dicapai penghematan waktu, biaya, dan sumber daya dalam pengambilan keputusan

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government, dijelaskan bahwa E-Government merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

komunikasi dan informasi, serta guna meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimana untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Dengan melakukan pengembangan dalam E-Government menciptakan pengelolaan sistem manajemen dan proses kinerja pada lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (Nur Rahma Diani, 2017).

Kebijakan pemerintah implementasi *e-government* ini menekankan untuk menggunakan informasi teknologi di instansi pemerintah pusat dan daerah yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Demikian hanya dibidang kepegawaian, pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengolahan informasi kepegawaian sehingga mampu memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih baik, transparansi dan akuntabel (Muhammad Fandy Asyik, dkk, 2021).

BKN mengembangkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sebagai perwujudan dari implementasi *e-government* dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Kemudian BKN menginstruksikan kepada seluruh Kantor Regional yang berada diseluruh Indonesia, termasuk Kantor Regional yang berada di Pekanbaru. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru merupakan instansi yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian di wilayah Pekanbaru.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2008 Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian. SAPK lahir dari adanya tuntutan terhadap BKN untuk memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengolahan informasi kepegawaian, agar mendapatkan data PNS yang akurat melalui sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi antar instansi BKN dan instansi Pusat serta Daerah. Tujuan diciptakannya SAPK menurut Sudarmin (2016) adalah mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir disetiap instansi pusat maupun daerah yang terintegrasi secara nasional dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepegawaian secara transparan dan obyektif. SAPK diharapkan dapat meningkatkan akurasi data PNS yang berdampak terhadap *clean government* dan *good governance*. Dapat disimpulkan SAPK merupakan perwujudan dari implementasi E-Government dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mana dalam penggunaannya dilakukan untuk proses pelayanan kepegawaian. Diciptakannya SAPK sebagai solusi dari pemecahan masalah yang terjadi pada pelayanan kepegawaian terkhususnya mengenai proses penanganan dan pengolahan data – data kepegawaian. Sehingga dengan adanya SAPK dapat mewujudkan data – data kepegawaian yang lebih akurat, menghilangkan duplikasi data serta mempercepat diperolehnya informasi kepegawaian.

Adapun permasalahan sebelum penerapan SAPK di BKN ini ialah mengenai belum terintegrasinya data PNS satu sama lain kerap mengakibatkan terjadinya duplikasi data yang kemudian menyebabkan inefisiensi dalam mengenai masalah kepegawaian. Kemudian jumlah PNS yang harus dilayani begitu banyak yang datang dari masing – masing provinsi sehingga banyak usulan berkas masuk, banyaknya data pegawai yang harus ditangani dan alur pelayanan yang terkesan rumit, serta pekerjaan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Sudarmin, 2016). Oleh karena itu, dengan diciptakannya SAPK ini maka permasalahan – permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni dan Durinta Puspasari pada tahun 2015 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya para pegawai BKN dituntut untuk memberikan layanan prima dalam bidang kepegawaian, sehingga kualitas pelayanan pegawai juga harus diperhatikan. Dalam hal ini yang disebut penerima pelayanan dari BKN adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pelayanan yang diberikan oleh BKN hanya sebatas kepada PNS saja, bukan masyarakat luas. Sehingga surat maupun berkas yang diterima oleh bagian pusat pelayanan yaitu yang berhubungan dengan PNS, mulai dari calon pegawai negeri sipil hingga menjadi PNS, menetapkan nomor identitas PNS, kenaikan pangkat, perpindahan PNS. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi penanganan surat, agar proses penanganan berbagai surat yang diterima maupun yang dikirim oleh BKN dapat tertangani dengan baik serta lebih mempersingkat waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Delpa Nopri dan Dadang Mashur pada tahun 2014 menyatakan bahwa pengembangan E-Government yang dilakukan salah satunya adalah Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dikembangkan oleh BKN. Langkah ini dilakukan BKN untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal melaksanakan manajemen kepegawaian nasional. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang ruang lingkupnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dengan kata lain, setiap PNS di Indonesia yang akan mendapatkan pelayanan dari BKN, maka instansinya harus mengusulkan melalui SAPK ini. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka sanksi yang diberikan adalah tidak diprosesnya usulan yang diajukan tersebut. Penelitian yang telah dilakukan oleh Delpa Nopri dan Dadang Mashur, dimana mereka meneliti mengenai implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru pada tahun 2014 menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi SAPK kurang terimplementasi dengan baik, dan faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut adalah sumber daya manusia yang ada sangat terbatas dan sering diberi tugas tambahan dan kualitas fasilitas pendukung yang belum maksimal serta jaringan internet mengoperasikan SAPK sering mengalami gangguan.

Penerapan SAPK di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah berlangsung pada tahun 2011. Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan diketahui bahwa penerapan SAPK pada awal – awal tahun tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

belum berjalan sepenuhnya dikarenakan awal pemakaian SAPK belum bisa dioperasikan oleh pegawai sehingga diperlukannya sosialisasi dan pelatihan dalam mengoperasikan SAPK tersebut. Kemudian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru memiliki wilayah kerja yang melayani kepegawaian pada 41 instansi Kabupaten/Kota yang tersebar di Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kepulauan Riau. sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.1
Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Riau	12
2	Sumatera Barat	19
3	Kepulauan Riau	7
Jumlah		38

Sumber : Pekanbaru.bkn.go.id

Dari data diatas terlihat bahwa Kantor Regional XII BKN Pekanbaru memiliki 3 wilayah kerja dimana jumlah provinsi dari kab/kota yang harus dilayani sebanyak 38 (tiga puluh delapan). Kemudian jumlah PNS yang harus dilayani begitu banyak yang datang dari masing – masing provinsi sehingga banyak usulan berkas masuk. Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis dari Kantor Regional XII BKN Pekanbaru pada periode tahun 2018 dan 2019 keseluruhan usulan masuk untuk penetapan NIP CPNS, sebagaimana dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1.2
Usulan Masuk Penetapan NIP CPNS Periode 2018-2019

No	Tahun	Jumlah
1	2018	10.132
2	2019	6.437

Sumber : Data Olahan Kanreg XII BKN Pekanbaru, 2021

Dari data tersebut terlihat bahwa pada periode tahun 2018 keseluruhan usulan masuk penetapan NIP CPNS yang telah di ACC berjumlah 10.132 dari 41 instansi di wilayah kerja kantor regional XII BKN Pekanbaru dan pada periode 2019 keseluruhan usulan berkas masuk untuk penetapan NIP CPNS yang berjumlah 6.437 dari 40 instansi di wilayah kerja kantor regional XII BKN Pekanbaru.

Berdasarkan hasil awal observasi dan data yang diperoleh, dilihat dari banyaknya usulan berkas masuk pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dan pentingnya pengurusan dokumen kepegawaian yang mana dalam proses usulan berkas masuk tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan secara manual dikarenakan hal tersebut kurang efektif. Dan seperti yang diketahui dokumen kepegawaian merupakan salah satu dokumen penting dalam instansi pemerintahan dikarenakan dalam prosedur pemeliharaan dokumen kepegawaian PNS sebagai aset sejarah perjalanan karir seorang PNS sehingga perlu dipelihara dan dikelola dengan baik agar nilai guna dan usia dokumen dapat bertahan lama (Putra, Sultan kharisma & Mecca, 2016). Maka dari itu, diperlukannya sebuah sistem aplikasi untuk menghimpun dan menyimpan seluruh dokumen kepegawaian. Apabila dokumen kepegawaian dapat tersimpan dalam bentuk digital pada sebuah sistem aplikasi, maka hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan data yang lebih akurat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan transparan kemudian informasi yang terdapat di dalamnya pun dapat ditemukan dengan mudah dan cepat pada saat diperlukan serta tidak terjadi kesalahan dalam pengklasifikasiannya. Maka dari itu, penerapan SAPK diharapkan dapat memepermudah kinerja pegawai dalam pengurusan dokumen kepegawaian

Perkembangan pemanfaatan SAPK dan juga penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai implementasi dari SAPK tentunya akan mengalami beberapa perubahan dan peningkatan pada SAPK seiring berjalannya waktu. Berdasarkan pada awal observasi dan hasil wawancara sementara dapat diketahui pemanfaatan SAPK tidak hanya digunakan oleh para pegawai BKN dan Kantor Regional dalam melayani beberapa pelayanan kepegawaian dalam proses penanganan usulan berkas masuk dan pengurusan dokumen kepegawaian. Namun, SAPK sudah bisa digunakan oleh para PNS melalui sistem yang bernama MYSAPK. MYSAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk PNS yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi profil PNS (Sidiq B.S & Dewi S.D, 2021). Dengan adanya MYSAPK ini memudahkan PNS diseluruh instansi dapat mengakses data kepegawaiannya dan juga mengupdate data kepegawaian tanpa harus datang langsung ke Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Sehingga dengan adanya sistem aplikasi ini data kepegawaian menjadi lebih akurat. Namun, dari hasil awal observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis, ditemukannya beberapa masalah mengenai SAPK ini diantaranya yaitu adanya keluhan dari pegawai Kanreg XII yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengoperasikan SAPK yaitu mengenai masalah jaringan yang mana berdampak pada terganggunya sistem tersebut sehingga proses pelayanan dalam pengurusan dokumen kepegawaian pun menjadi terhambat. Kemudian penulis juga melihat banyaknya keluhan dari para PNS yang menggunakan MYSAPK seperti aplikasi yang sering error dan server yang sering *down* sehingga mempersulit PNS dalam mengupdate data kepegawaiananya. Dari beberapa masalah yang telah diuraikan terkait penggunaan pada sistem tersebut, maka perlu dilihat sejauh mana keberhasilan dari sistem tersebut.

Efektivitas menurut Yamit dalam (Lestari et.al, 2014) adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat dicapai baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya adalah pada keluaran (output) yang dihasilkan. Selanjutnya menurut Mahsun (2013) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Dan menurut Beni (2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, prosedur dari organisasi. Sehingga dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu pengukuran sejauh mana tingkat keberhasilan dari target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur dalam membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Terkait demikian, dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu program maka diperlukan ukuran – ukuran dalam efektivitas (Starawaji, 2009).



Penerapan sistem yang baik tentunya akan menyebabkan pemrosesan maupun pengolahan data lebih efektif sehingga penilaian efektif tidaknya sistem tersebut sangatlah penting (Saputra & Yadnyana, 2015). Sistem yang efektif dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi yang menggunakannya (Vivi Sahfitri, 2012). Efektivitas sistem dilihat dari sejauh mana sistem tersebut dapat memberikan kemudahan bagi pengguna sistem tersebut dan sejauh mana sistem tersebut dapat mewujudkan target yang telah ditetapkan. Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah berlangsung lama dan belum adanya penelitian sebelumnya mengenai efektivitas SAPK di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya kebanyakan meneliti mengenai implementasi dari SAPK tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai efektivitas dari SAPK dalam pengurusan dokumen kepegawaian. Selain itu juga dari awal observasi dan hasil wawancara ditemukan beberapa masalah terkait SAPK tersebut. Maka dari itu, menurut Qashdina dan Evayani (2018) agar tujuan digunakannya suatu sistem informasi dapat tercapai perlu dilakukan penelaahan terhadap sistem yang digunakan selama ini, apakah sistem tersebut telah efektif dalam mencapai target yang telah ditetapkan, ataukah mungkin perlu dilakukan pengembangan atas sistem yang telah ada agar target dapat tercapai dengan lebih baik. Efektivitas Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam pengurusan dokumen kepegawaian menjadi suatu hal yang penting untuk diteliti karena melalui penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Keberhasilan dari suatu sistem tersebut dapat tergambarkan dengan baik. Keberhasilan penerapan suatu sistem dengan melihat efektivitas dari sistem aplikasi tersebut apakah sudah memberikan manfaat dalam hal mempermudah pekerjaan para pengguna sistem dan meningkatkan pelayanan terutama dalam proses pengurusan dokumen kepegawaian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Pengurusan Dokumen Kepegawaian Pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan pada latar belakang, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam proses pengurusan dokumen kepegawaian?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam pengurusan dokumen kepegawaian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan dia atas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan SAPK dalam proses pengurusan dokumen kepegawaian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis, memberi manfaat sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian untuk mengembangkan ilmu khususnya Ilmu Administrasi Negara serta juga dapat menambah wawasan keilmuan peneliti dibidang kepegawaian
2. Manfaat Praktis, diharapkan kajian penelitian ini menjadi rekomendasi kepada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru tentang efektivitas penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam pengurusan dokumen kepegawaian
3. Menjadi salah satu bahan referensi bagi peneliti berikutnya tentang kajian efektivitas penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam pengurusan dokumen kepegawaian
4. Manfaat bagi penulis, dapat menambah dan memperluas wawasan penulis dalam penyusunan skripsi terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta merupakan pembelajaran dan pengalaman yang berharga dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di dalam perkuliahan.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka dikemukakan batasan penelitian sebagai berikut :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pada analisis ini penulis memfokuskan pada efektivitas penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam pengurusan dokumen kepegawaian
2. Penelitian ini dilakukan di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian, penulis membagi penelitian ini dalam enam bab pembahasan dimana masing-masing bab terbagi menjadi sub bagian dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, batasan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan kajian teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, pandangan islam, penelitian terdahulu, definisi konsep, indikator penelitian kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, subjek dan objek, serta teknik analisa data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek penelitian dan tempat dimana dilakukannya penelitian seperti lokasi penelitian, sejarah objek penelitian, struktur organisasi dan lain – lain.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan serta menjelaskan tentang hasil penelitian yaitu efektivitas penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam pengurusan dokumen kepegawaian pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Ratminto dalam (Muslim dan Larbiel Hadi, 2019) adalah sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Miliki Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. Selanjutnya pelayanan publik menurut Batinggi dalam (Muslim dan Larbiel Hadi, 2019) adalah sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengurus hal – hal yang diperlukan masyarakat sebagai khalayak umum. Dengan demikian, kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara.

Menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian perbuatan atau kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pertanggungjawaban dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang ataupun jasa sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 dalam (Muslim dan Larbiel Hadi, 2019) untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas pelayanan sebagai berikut :

- a. **Transparansi**
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
- b. **Akuntabilitas**
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- c. **Kondisional**
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas
- d. **Partisipatif**
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat
- e. **Kesamaan hak**
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Keseimbangan Hak Kewajiban
- g. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing – masing pihak.

Adapun prinsip pelayanan publik didalam Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit – belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan
2. Kejelasan
Kejelasan ini mencakup dalam hal :
 - a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik
 - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
3. Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
4. Akurasi
Prosedur pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum

6. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik

7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)

8. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika

9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberika pelayanan dengan ikhlas

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain – lain



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 E-Government

E-Government adalah program penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan kinerja pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, komunikasi dan informasi yang canggih guna memperbaiki kualitas pelayanan agar lebih transparan, efektif dan efisien.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government, yaitu :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga – lembaga negara penyedia fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara

4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Melihat Inpres RI No. 3 Tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa di era globalisasi yang terus berkembang dengan munculnya berbagai kemudahan dalam pemanfaatan teknologi berbasis digital sehingga pemerintah melakukan pengembangan E-Government ini dengan pemanfaatan dibidang teknologi dan informasi dengan pembentukan sistem manajemen yang lebih maksimal lagi guna meningkatkan kinerja selain hal ini dapat mempermudah segala urusan dalam pelayanan publik sehingga dengan adanya pengembangan dalam E-Government dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Manfaat E-Government menurut Indrajit (Hadi, 2019) yaitu :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *good governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari – hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber – sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak – pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan – perubahan global dan *trend* yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan secara merata dan demokratis.

Manfaat yang diperoleh dalam penyelenggaraan E-Government ini sangatlah berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintah untuk kedepannya dengan menekankan kualitas dari pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. tidak hanya penggunaan teknologi namun E-Government ini dapat memberikan interaksi kepada pemerintah dengan masyarakatnya sehingga masyarakat bisa ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Seperti yang kita ketahui masyarakat sangat berperan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan – kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Peran pemerintah sangat penting dalam pengembangan E-Government ini, sehingga pemerintah harus ikut andil dalam mengawasi perkembangan dari E-Government. Jika pengembangan E-Government ini berhasil maka manfaat yang diberikan sangatlah banyak. Sehingga perwujudan dari pengembangan E-Government ini kedepannya dapat memperbaiki kualitas dalam pelayanan publik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Efektivitas

Efektivitas menurut Sedarmayanti (2013: 59) bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat dicapai.

Berdasarkan dari pengertian efektivitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi suatu target, maka target tersebut akan dilihat sejauh mana tingkat keberhasilan dari beberapa indikator yang ada, jika tingkat keberhasilannya melebihi ekspektasi maka target tersebut mencapai sesuatu yang telah diharapkan. Namun dalam mencapai target tersebut didukung dengan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasana yang ada sehingga hal ini dapat memaksimalkan usaha untuk mencapai target yang telah ditentukan atau yang telah dicita – citakan. Dengan kata lain, efektivitas dapat dikatakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian suatu tujuan.

1. Ukuran Efektivitas

Sedangkan ukuran efektivitas menurut Sedarmayanti (Sedarmayanti, 2013) yaitu :

- a. Input, yaitu merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil.
- b. Proses, efektivitas dapat diwujudkan apabila memperhatikan proses produksi yang mempunyai kualitas karena dapat mempengaruhi pada kualitas hasil yang akan dicapai secara keseluruhan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hasil, hasil berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi.
- d. Produktivitas, adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien.

Dari penjelasan mengenai ukuran efektivitas diatas, maka dapat disimpulkan ukuran merupakan sebagai indikator dalam penentuan sebuah efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Maka indikator ini akan menuntun ke sasaran – sasaran yang ingin dicapai. Selain itu juga ukuran ini akan menunjukkan sejauh mana keberhasilan suatu program ataupun kegiatan dalam menjalankan suatu fungsinya secara maksimal.

Efektivitas Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah melihat sejauh mana tingkat keberhasilan sistem aplikasi dalam kegiatan organisasi yang mencakup upaya peningkatan kinerja pegawai dalam pengurusan dokumen kepegawaian dengan menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga apakah penggunaan aplikasi tersebut dapat efektif dalam pengurusan dokumen kepegawaian yang mana akan berdampak dalam meningkatkan pelayanan kepada PNS.

2.4 Efektivitas Sistem

Efektivitas Sistem adalah melihat sejauh mana tingkat keberhasilan sistem aplikasi dalam kegiatan organisasi yang mencakup upaya peningkatan kinerja dengan menggunakan sistem aplikasi tersebut. Sehingga apakah penggunaan



sistem aplikasi tersebut dapat efektif dalam menunjang kinerja penggunanya yang mana akan bermanfaat bagi penggunanya.

Dalam mengukur efektivitas tidak hanya dilakukan untuk mengukur efektivitas kinerja suatu organisasi saja namun pengukuran efektivitas dapat juga dilakukan untuk mengukur suatu efektivitas sistem. Dikarenakan penulis membahas tentang efektivitas suatu sistem aplikasi pelayanan kepegawaian maka ada teori dalam menganalisis sebuah sistem.

Teori menurut Wukil Ragil (2010) Analisis PIECES (*Performance, Information, Economy, Control, Eficiency And Service*) sebagai dasar untuk memperoleh pokok – pokok permasalahan yang lebih spesifik biasanya akan dilakukan terhadap beberapa aspek antara lain adalah kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan pelanggan. Analisis ini biasanya akan ditemukan beberapa masalah utama maupun masalah yang bersifat gejala dari masalah utama. Berikut penjelasan mengenai PIECES (*Performance, Information, Economy, Control, Eficiency, and Service*) sebagai berikut :

a. *Performance* (Kinerja)

Kinerja merupakan variabel pertama dalam metode analisis PIECES. Dimana memiliki peran penting untuk menilai apakah proses atau prosedur yang ada masih mungkin ditingkatkan kinerjanya, dan melihat sejauh mana dan seberapa handalkah suatu sistem informasi dalam berproses untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini kinerja diukur dari *Throughput*, yaitu jumlah pekerjaan/*output/deliverables* yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan/dihasilkan pada saat tertentu dan *Response time*, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan *output/deliverables* tertentu.

b. *Information* (Informasi)

Menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki sehingga kualitas informasi yang dihasilkan menjadi semakin baik. Yang dimaksud kualitas informasi yang semakin baik adalah yang semakin relevan, akurat, andal dan lengkap serta disajikan secara tepat waktu.

c. *Economy* (Ekonomi)

Menilai apakah prosedur manfaatnya (nilai gunanya) atau diturunkan biaya penyelenggaraannya.

d. *Control* (Kontrol)

Menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat ditingkatkan sehingga kualitas pengendalian semakin baik, dan kemampuannya untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan menjadi semakin baik pula.

e. *Efficiency* (Efisiensi)

Menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki, sehingga tercapai peningkatan efisiensi operasi, dan harus lebih unggul dari pada sistem manual.

f. *Service* (Layanan)

Menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki kemampuannya untuk mencapai peningkatan kualitas layanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur suatu efektivitas sistem maka suatu sistem tersebut dapat dikatakan berhasil apabila dalam penggunaannya dapat mempermudah pekerjaan para pengguna sistem tersebut. Sehingga apabila sistem itu efektif maka dalam pelaksanaan kinerja suatu organisasi dapat dilakukan dengan maksimal.

2.5 SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membangun suatu sistem aplikasi untuk mewujudkan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akurat melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara online. Dalam implementasi SAPK maka dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan SAPK.

SAPK sebagai perwujudan dari pelaksanaan E-Government dimana sistem ini memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki sistem manajemen serta meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepegawaian agar pelayanan kepegawaian dapat terkoordinasi dengan baik.

Adapun tujuan BKN menerapkan SAPK, antara lain :

1. Standarisasi sistem informasi kepegawaian berbasis informasi teknologi yang terintegrasi sebagai media dalam pelayanan, pengawasan, dan pengendalian administrasi kepegawaian.
2. Tersedianya database kepegawaian sebagai media informasi sharing bagi instansi dan stakeholders sesuai dengan kebutuhan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tersedianya data dan informasi yang *up to date* dengan cepat dan akurat
 - b. Menghilangkan duplikasi sistem dan data
 - c. Menyederhanakan dan meningkatkan standarisasi proses
 - d. Optimalisasi beban tugas
 4. Meningkatkan pelayanan kepegawaian bagi pegawai negeri sipil
 5. Penerapan *good governance*
 - a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
 - b. Meningkatkan *public image* pemerintah
 6. Meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dan *stakeholders* untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian
 7. Meminimalisasi *digital divide* sumber daya manusia pengelola data kepegawaian.
- Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan SAPK ini bagi BKN maupun instansi pemerintah, yaitu :
1. Dapat mengontrol data PNS dan BKN dan instansi pemerintah seluruh Indonesia
 2. Menyederhanakan proses manajemen kepegawaian
 3. Otomatisasi administrasi kepegawaian sehingga bisa mencegah terjadinya kesalahan dalam data kepegawaian.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Diperoleh database kepegawaian yang akurat sebagai bahan perencanaan, Pembinaan, Pengembangan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian.

Ruang lingkup pada SAPK antara lain :

1. Aplikasi pengadaan PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data mengenai pengadaan PNS meliputi pembuatan daftar usul permintaan NIP sampai pencetakan surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS.
2. Aplikasi kenaikan pangkat PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data mengenai proses kenaikan pangkat PNS mulai dari usul sampai pencetakan surat keputusan kenaikan pangkat.
3. Aplikasi pensiun yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data untuk keperluan mutasi pemberhentian dengan hak pensiun.
4. Aplikasi mutasi lain – lain yaitu yang berisi pengolahan data kepegawaian untuk keperluan pemutakhiran data melalui perubahan data pegawai yang mengalami mutasi.

Karakteristik SAPK yaitu :

1. Sistem yang terkoneksi secara online antara BKN Pusat, Kantor Regional BKN dan instansi dengan menggunakan jaringan komunikasi data.
2. Menggunakan satu basis data PNS yang digunakan secara bersama.
3. Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai standar baku yang disusun oleh BKN Pusat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi pengguna seperti penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), DP3, Penggajian dan sebagainya.

Pada penggunaan SAPK ada kewenangan yang berbeda antara BKN Pusat.

BKN Kantor Regional dan BKD. Adapun kewenangan dalam penggunaan SAPK adalah sebagai berikut :

1. BKN Pusat memiliki seluruh kewenangan dalam menggunakan SAPK sehingga setiap modul yang ada pada SAPK dapat digunakan.
2. BKN Kantor Regional, memiliki kewenangan antara lain : pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun, peremajaan data dan supervisi.
3. BKD/Instansi memiliki kewenangan khusus untuk pelayanan kepegawaian seperti pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun dan peremajaan data.

Peraturan Kepala BKN yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Kepala BKN No. 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan perpindahan Antar Instansi Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara online. Pernyataan tersebut dapat diuraikan secara umum sebagai berikut : (Sumber: Portal BKN www.bkn.go.id)

1. Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap PNS perlu ditetapkan prosedur penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP), Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri



Sipil, dan Perpindahan Antar Instansi Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara online, sehingga dapat dilakukan secara efisien

2. Proses penetapan NIP, Pemberian Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat PNS, Penetapan Keputusan Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PNS Dan Penetapan Keputusan Pindah Instansi dilakukan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara online yang terintegrasi antara Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Serta Instansi Lainnya

3. Dalam rangka menjamin validitas dan legalitas, dokumen kepegawaian, maka pejabat pembina kepegawaian daerah, selain menyampaikan dalam format elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian secara online, juga menyampaikan dokumen kepegawaian secara hard copy.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa SAPK adalah sistem aplikasi berbasis online dimana dalam penggunaannya untuk menginput data – data kepegawaian PNS. Penerapan SAPK penting dilakukan guna untuk memudahkan dalam proses pelayanan kepegawaian PNS sehingga data – data pegawai PNS dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Dengan adanya sistem aplikasi pelayanan kepegawaian maka data – data pegawai PNS dapat terintegrasi antara badan kepegawaian negara pusat dengan instansi pemerintah lainnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan SAPK dengan Pengurusan dokumen dalam penelitian ini yaitu pengurusan / penanganan dokumen sangat penting dilakukan karena didalam dokumen berisi informasi penting terkait data – data pegawai PNS, sehingga dalam pengurusan dokumen ini harus dilakukan secara digital agar tidak terjadinya duplikasi data ataupun data yang hilang dikarenakan dalam proses pengurusan dokumen yang dilakukan secara manual. Sehingga SAPK sebagai sistem aplikasi berbasis online yang digunakan untuk membantu pengguna dalam pencatatan berbagai berkas usulan masuk yang kita ketahui SAPK digunakan dalam berbagai proses layanan kepegawaian sehingga banyaknya data - data kepegawaian yang dalam jumlahnya sangat banyak dapat memudahkan dalam proses pengurusan dokumen menjadi lebih efektif dan terstruktur.

2.6 Pengurusan Dokumen Kepegawaian

Pengurusan dokumen kepegawaian merupakan proses penanganan atau pengelolaan dokumen yang berisi data – data atau informasi penting mengenai pegawai PNS yang tersimpan didalamnya agar tersimpan dengan baik, sehingga dalam proses pencarian dokumen tersebut mudah dicari.

Dalam pengelolaan dokumen kepegawaian diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. Untuk penjelasan selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut : (Sumber: buku panduan kepegawaian 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian
 - a. Data adalah fakta – fakta baik berupa angka – angka, teks, dokumen, gambar, bagan, suara yang mewakili deskripsi verbal atau kode tertentu dan sebagainya. Apabila data telah disaring dan diolah melalui sistem pengolahan sehingga memiliki arti dan nilai bagi seseorang, maka data itu berubah fungsi menjadi informasi. Dengan demikian yang dipakai dalam pembuatan keputusan adalah informasi yang berbasis data.
 - b. Dokumen kepegawaian adalah kumpulan data dan dokumen/akta – akta kepegawaian dari seseorang Pegawai Negeri Sipil.
2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pengelolaan dokumen kepegawaian adalah untuk mendukung kelancaran proses administrasi kepegawaian. Dokumen kepegawaian memuat bukti – bukti fisik administrasi yang sewaktu – sewaktu sangat dibutuhkan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu juga dimaksudkan untuk membantu penyediaan informasi kepegawaian dalam pengambilan keputusan.
3. Jenis – jenis dokumen kepegawaian

Adapun jenis – jenis dokumen kepegawaian yang harus disimpan antara yaitu SK CPNS, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), STTPL Prajabatan, Sumpah PNS, SK CPNS, SK Mutasi, Penetapan Angka Kredit (PAK), SK Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Sumpah Jabatan, SK Peninjauna Masa Kerja, SK Cuti di Luar Tanggungan Negara, SK



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pengaktifan Kembali Setelah Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara, SK Tugas Belajar, Ijazah pertama sampai dengan akhir, SK tanda Kehormatan, SPT Kenaikan Gaji Berkala, SK Konversi NIP, SK Kenaikan Pangkat, SK Pensiun, Kartu Pegawai, Kartu Pegawai Elektronik, BPJS, NPWP, Kartu Suami/Istri, Surat Nikah, KTP, Kartu Keluarga, Kartu Taspen, SKP, SK Hukuman Disiplin, Sertifikat Diklat Struktural, Sertifikat Diklat Teknis/Fungsional.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui pentingnya dalam penanganan dokumen kepegawaian dilakukan agar dokumen kepegawaian tersebut tetap terjaga informasi didalamnya. Adapun dokumen kepegawaian tersebut berisi bukti – bukti fisik yang sewaktu – waktu akan diperlukan. Sehingga dokumen tersebut harus terjaga dengan baik demi kelancaran proses administrasi kepegawaian. Sehingga dibutuhkannya suatu sistem aplikasi yang dapat merangkum seluruh dokumen kepegawaian dalam bentuk digital agar sewaktu waktu dokumen tersebut dibutuhkan dapat diakses dengan cepat kapan pun dan dimana pun.

2.7 Pandangan Islam Tentang Konsep Penelitian

Manusia sebagai ciptaan Allah SWT yang mempunyai akal dituntut untuk mempelajari segala hal. Di zaman yang serba canggih ini, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Manusia berlomba – lomba untuk menciptakan sesuatu dengan memanfaatkan teknologi yang canggih untuk mempermudah pekerjaan mereka. Adanya inovasi dan ide yang dapat mengembangkan potensi diri dari manusia itu sendiri untuk lebih maju. Jauh



sebelum itu, teknologi, ilmu pengetahuan dan segala isi di dunia ini sudah ada dijelaskan di dalam Al- Quran maka sebaiknya kita sebagai manusia haruslah terus berpedoman kepada Al- Quran dan Hadits. Adapun firman Allah SWT yang menjelaskan mengenai teknologi yaitu di dalam surah Al – Anbiya’ ayat 80, yang berbunyi :

وَعَلَّمَنَّهُ صِنْعَةَ لِبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بِأْسِكُمْ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

Artinya : *“Dan Kami ajarkan (pula) kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)?”* (QS. Al-Anbiya 21: Ayat 80).

Di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa nabi Daud as diberitahu oleh Allah SWT. Bagaimana cara membuat baju pelindung yang terbuat dari besi untuk melindunginya dalam peperangan. Maka dari itu dapat kita lihat perkembangan dari baju besi tersebut yang awalnya hanya dengan berbahan besi sekarang baju tersebut dibuat dengan bahan dan pembuatannya menggunakan alat – alat yang canggih. Perkembangan teknologi yang sangat maju menciptakan alat – alat yang canggih sehingga baju tersebut bisa untuk menahan tembakan peluru sehingga dapat kita lihat adanya kemajuan dari pembuatan baju pelindung tersebut seiring berjalannya waktu. Kita dapat belajar dari pendahulu bagaimana mulanya teknologi itu dapat tercipta dan kita dapat memanfaatkan teknologi yang semakin canggih sampai saat ini.

Selanjutnya firman Allah SWT. Dalam Surah Al – Baqarah ayat 164, yang berbunyi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي
 الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya : “*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, maka dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah matinya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*”

Pada ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, turunnya hujan dari langit, serta pengisaran angin dan awan, yang semua itu adalah kebesaran Allah SWT hanya bagi orang yang memikirkannya. Maka dapat kita maknai Allah SWT memerintahkan manusia sebagai makhluk Allah SWT yang diberi akal untuk memikirkan dan melakukan penelitian terkait penciptaan langit yang terdiri dari adanya benda – benda yang ada di luar angkasa dan bumi beserta isi di dalamnya, bagaimana proses pergantian siang dan malam, bagaimana kapal bisa mengapung di atas air, bagaimana proses turunnya hujan dll. Semua itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, dengan adanya teknologi manusia bisa melakukan penelitian akan kebesaran Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dapat disimpulkan dari kedua ayat tersebut bahwa dengan adanya teknologi yang semakin canggih yang manfaatnya dapat kita rasakan, sehingga kita sebagai manusia harus memanfaatkan teknologi itu dengan tujuan baik. Namun, bukan sebaliknya memanfaatkan teknologi itu dengan tujuan yang tidak baik karena itu akan berdampak buruk bagi kita sendiri. Tidak hanya memanfaatkan namun sebagai manusia kita harus menciptakan inovasi yang dapat menghasilkan temuan – temuan sehingga bermanfaat untuk semua orang.

Dan kita harus selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Janganlah kita sebagai manusia tamak akan segala hal hingga membuat kita lupa bahwa semua yang didapatkan itu adalah pemberian dari Allah SWT.

2.8 Penelitian Terdahulu

1. Tri Wahyuni dan Durinta Puspasari dengan judul “Efektivitas Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Sebagai Kelancaran Penanganan Usulan Berkas Masuk Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional II Surabaya Jawa Timur” jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP) dari Universitas Negeri Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal ini peneliti menganalisis mengenai efektivitas SAPK sebagai kelancara penanganan usulan berkas masuk yang mana peneliti menganalisis menggunakan analisis PIECES untuk memperoleh hasil dari penelitian tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini SAPK sudah diterapkan di Badan Kepegawaian Negara Regional II



Surabaya Jawa Timur sejak tahun 2010 yang mana dalam pengaplikasiannya sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan SAPK sudah dapat mengoptimalkan kinerja pegawai yang menangani berkas – berkas yang berkaitan dengan kepegawaian. Namun dalam jenis persuratan lain masih dilakukan secara manual. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian milik Tri Wahyuni dan Durinta Puspasari menganalisis mengenai efektivitas SAPK dalam penanganan usulan berkas masuk. Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu sama – sama menganalisis efektivitas dari SAPK kemudian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta teknik pengumpulan data.

2. Nur Alam dengan judul “Pengelolaan Arsip Kepegawaian Melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar” jurnal skripsi Administrasi Negara dari Universitas Hasanuddin tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal ini peneliti menganalisis proses pengelolaan arsip kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian pada Kantor Regional XII BKN Makassar menggunakan indikator input, proses, penciptaan, penyimpanan, pengolahan, penemuan kembali, dan output dengan berdasarkan wawancara dengan informan maka hasil penelitian membuktikan bahwa informasi yang dihasilkan dari pengelolaan data pegawai dengan memanfaatkan SAPK, menunjukkan pemanfaatan SAPK

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pada Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar sudah cukup optimal dikarenakan informasi yang dihasilkan dari pengelolaan data kepegawaian dengan sistem aplikasi terbukti bahwa informasinya akurat, relevan serta tepat waktu. Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian milik Nur Alam menganalisis pengelolaan arsip kepegawaian melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) di Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik Nur Alam yaitu sama – sama menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

3. Sudarmin dengan judul “Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Badan Kepegawaian Negara dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara” Jurnal Tugas Akhir Program Magister di Universitas Terbuka Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan :
 - a. Implementasi kebijakan SAPK di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008
 - b. Terdapat 4 faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan SAPK di Badan Kepegawaian Negara dan Diklat Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Nunukan yang terdiri dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- c. Adapun upaya – upaya yang dilakukan untuk optimalisasi implementasi kebijakan antara lain :
 - 1) Sosialisasi berupa rapat khusus, pertemuan ataupun tatap muka langsung sehingga bisa tercipta tanya jawab dan dialog interaktif terutama di kecamatan
 - 2) Mengikutsertakan staf diklat analisis kepegawaian sebagai syarat untuk pengangkatan tenaga analisis kepegawaian
 - 3) Semua personil yang mengoperasikan SAPK dalam pelayanan kepegawaian diangkat secara formal sebagai Tim SAPK dan diberikan insentif.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian milik Sudarmin menganalisis implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. Persamaan penelitian ini dengan milik penelitian Sudarmin yaitu sama – sama menggunakan teknik pengumpulan data dan analisis data.

4. Delpa Nopri dan Dadang Mashur dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian” jurnal Administrasi Pembangunan dari Universitas Riau Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan SAPK di Kantor Regional XII



belum terlaksana dengan maksimal hal ini dibuktikan dalam pelaksanaan SAPK dalam proses pemberian persetujuan kenaikan pangkat dalam melakukan verifikasi usulan masih dilakukan secara manual, selain itu permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan implementasi SAPK yaitu prosedur yang telah ditetapkan setelah dalam pelaksanaan SAPK tidak terlaksana secara konsisten sehingga mengakibatkan proses rekonsiliasi data sebagai langkah awal dalam implementasi SAPK tidak dilakukan oleh instansi terkait. Hal ini dikarenakan kurangnya komitmen instansi pengusul untuk menyampaikan usulan kenaikan pangkat PNS di lingkungannya 3 bulan sebelum periode sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, lebih dari itu bahkan ada instansi yang menyampaikan usulan melebihi batas akhir waktu yang telah ditentukan. Sehingga mengakibatkan banyaknya beban kerja yang belum terselesaikan padahal batas waktu berlakunya persetujuan kenaikan pangkat sudah masuk. hal ini tentunya berdampak terhadap ketepatan waktu bagi Kantor Regional XII untuk mengeluarkan nomor persetujuan. sehingga proses implementasi SAPK tentunya belum berjalan dengan baik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian milik Delpa Nopri dan Dadang Mashur mereka menganalisis Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Persamaannya pada penelitian ini dengan penelitian milik Delpa Nopri dan Dadang Mashur yaitu tempat penelitian yang sama serta menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan batasan terhadap masalah – masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konsep yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain :

1. E-Government merupakan suatu penyelenggaraan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi berbasis digital dengan menciptakan suatu produk atau sistem aplikasi guna untuk memperbaiki sistem manajemen organisasi yang mana dapat mempermudah kinerja para pegawai.
2. Efektivitas sistem merupakan suatu pengukuran tingkat keberhasilan dalam penggunaan sistem yang mana suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila dalam penggunaan sistem tersebut dapat mempermudah pekerjaan para penggunanya. Sebaliknya, sistem dikatakan tidak efektif apabila sistem tersebut tidak menghasilkan manfaat untuk penggunanya.
3. SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) merupakan suatu implementasi dari pengembangan E-Government untuk menangani masalah kepegawaian. SAPK adalah suatu sistem informasi berbasis online yang digunakan dalam berbagai proses layanan kepegawaian.
4. Pengurusan Dokumen Kepegawaian merupakan suatu penanganan atau pengelolaan dokumen kepegawaian dimana dalam proses pengelolaannya



dilakukan untuk menjaga informasi pegawai agar tidak terjadinya duplikasi atau hilangnya dokumen yang berisi informasi pegawai tersebut.

Variabel/Indikator Penelitian

Sugiyono (2014: 38) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah berpedoman kepada teori mengukur efektivitas sistem menurut Wukil Ragil yaitu PIECES yang mana menganalisa kinerja (*Performance*), informasi (*Information*), ekonomi (*Economy*), kontrol (*Control*), efisien (*Efficiency*) dan jasa atau layanan (*Service*). Untuk mengukur efektivitas sistem, adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah mengenai analisis Efektivitas Penerapan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dalam Pengurusan Dokumen Kepegawaian Pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

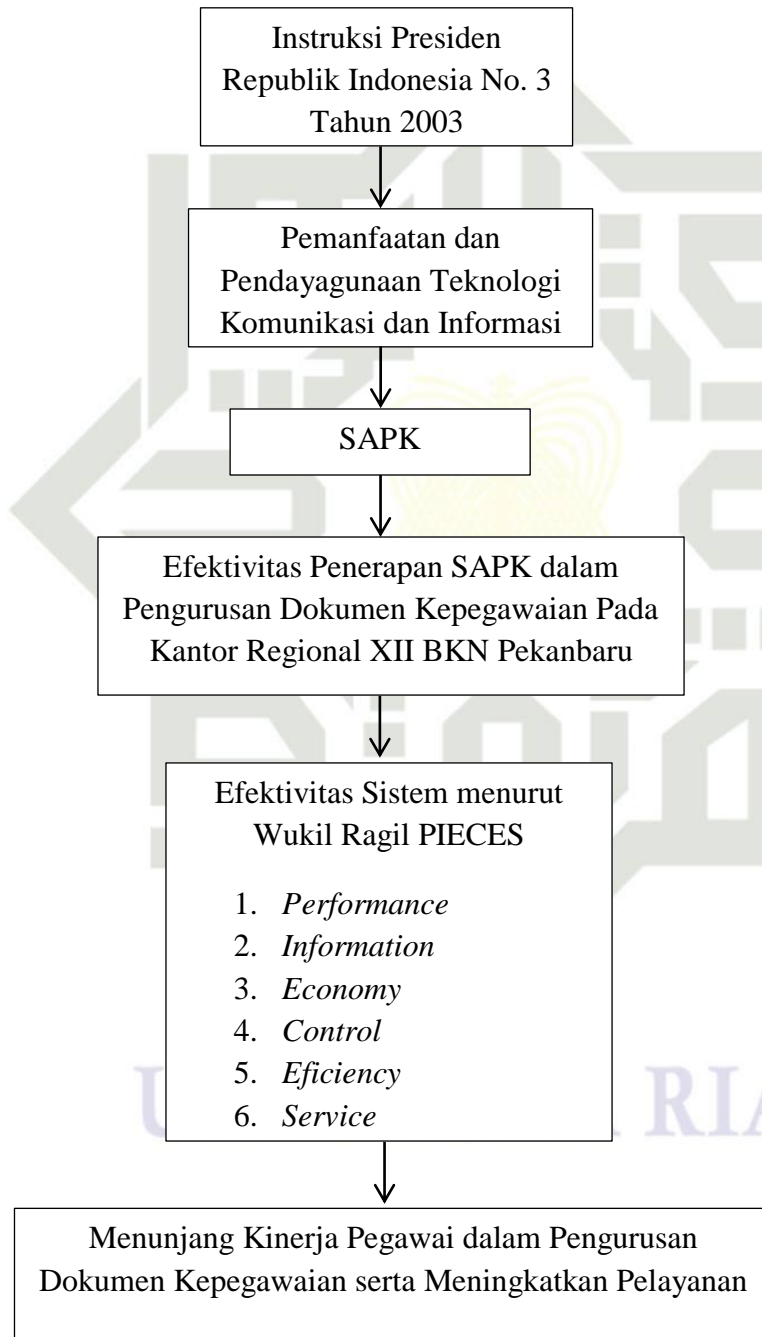
Tabel 2.1
Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Pengurusan Dokumen Kepegawaian Pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Berdasarkan Pengukuran Efektivitas Sistem Wukil Ragil (2010) PIECES	1. Performance	a. <i>Throughput</i> /Jumlah Pekerjaan yang dihasilkan
		b. <i>Response Time</i> /waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan
	2. Information	a. Menghasilkan Informasi yang Cepat, Akurat, dan Relevan
	3. Economy	a. Biaya Operasional
	4. Control	a. Keamanan Sistem Dalam Menyimpan Data - Data Pegawai
		b. Evaluasi dan Pembaharuan Pada SAPK
	5. Efficiency	a. Efisiensi Sumber Daya
		b. Kinerja Menjadi Lebih Efisien
		c. Menghilangkan Duplikasi Data
	6. Service	a. Kemudahan Dalam Mengakses SAPK
		b. Meningkatkan Pelayanan
		c. Manfaat yang Diperoleh Dengan Adanya SAPK

Sumber: Teori Mengukur Efektivitas Sistem dari Wukil Ragil (2010)

2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan garis besar atau rancangan alur pemikiran secara singkat untuk menjelaskan penelitian secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berupa uraian kata – kata tanpa adanya perhitungan angka - angka maksudnya disini yaitu pada data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini tidak berwujud angka namun data akan diuraikan dengan kata – kata.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari spektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena masalah yang diteliti berupa data yang lebih tepatnya dijelaskan menggunakan kata-kata (Ruslan, 2013).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan apa yang dilihat berdasarkan hasil pengamatan dari penelitian dengan uraian kata-kata tanpa menggunakan prosedur-prosedur statistik atau angka-angka.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan proposal ini peneliti melakukan penelitian yang dilaksanakan di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang terletak di Jalan Hang Tuah Ujung No. 148, Sialang Sakti, Kec.Tenayan Raya di kota Pekanbaru. Pada kurun waktu Mei 2021 sampai dengan Juli 2021. Penentuan lokasi ini antara lain berdasarkan atas pertimbangan bahwa di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sudah menerapkan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dan juga belum dilakukannya pengukuran keberhasilan dari sistem tersebut. Terkait dengan pertimbangan tersebut juga karena Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang sudah menggunakan SAPK dalam pengurusan dokumen kepegawaian menjadi lebih efektif atau tidak.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis data

Ada dua jenis data yaitu :

a. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata – kata atau data non numerik. Data kualitatif diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan, data observasi dll. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Data kualitatif yang digunakan adalah data, gambar dan informasi mengenai tinjauan umum pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru seperti sejarah berdirinya instansi, visi dan misi, struktur organisasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskripsi tugas dan data lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

- b. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan atau numerik. Data kuantitatif diperoleh dengan diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data kuantitatif pada penelitian ini yaitu jumlah pegawai PNS, Jumlah wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dan data lainnya.

3.3.2 Sumber Data

Berdasarkan sumber data, maka data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Data primer, data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan responden tentang pendapatnya yang berkaitan dengan efektivitas penerapan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dalam pengurusan dokumen kepegawaian di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.
- b. Data sekunder. Menurut Sugiyono sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2010). Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari literatur buku – buku, data dokumen – dokumen yang berkaitan dengan kepegawaian, media internet dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia



serta data – data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala – gejala yang diteliti. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Sudaryono, 2019). Teknik ini dilakukan dengan cara datang, cara pendekatan, dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data – data awal dan data sekunder dari Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Sudaryono, 2019). Dalam penelitian ini penulis akan melakukan tanya jawab kepada pihak – pihak terkait. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber yaitu menggunakan panduan berupa pertanyaan – pertanyaan yang akan diberikan kepada informan untuk memperoleh data mengenai efektivitas penerapan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dalam pengurusan dokumen kepegawaian di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, pena, dan handphone.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku – buku yang relevan, peraturan – peraturan, laporan kegiatan, foto – foto film dokumenter, data yang relevan penelitian (Sudaryono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari buku – buku yang relevan, dokumen pemerintah, peraturan – peraturan, dan data relevan.

3.5 Subjek dan Objek Penelitian

3.5.1 Subjek penelitian

Dalam penelitian ini, pemilihan subjek penelitian yang dianggap sebagai *key informan* dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Key Informan* yaitu subjek yang paling tahu, dalam penelitian kualitatif (Arikunto, 2010). Dalam pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam mengkaji objek atau situasi yang diteliti. Subjek dalam penelitian yang dipilih harus memenuhi kriteria tentang objek penelitian. Sehingga peneliti akan mendapat informasi yang berguna untuk penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Key Informan Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah Informan
1	Kepala Bidang Informasi Kepegawaian	1
2	Kepala Seksi Verifikasi dan Pelaporan Mutasi dan Status Kepegawaian	1
3	Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun	1
4	User atau Pengguna	2
5	Pegawai Negeri Sipil yang Menggunakan MYSAPK	3
Jumlah		8

3.5.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian, atau dengan kata lain segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian juga merupakan segala sesuatu permasalahan yang hendak diteliti (Suharsimi, 2006: 90).

Adapun objek dalam penelitian ini adalah efektivitas penerapan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dalam pengurusan dokumen kepegawaian di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh dan dianggap kredibel (Sugiyono, 2010). Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 246), mengungkapkan bahwa kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis data metode deskriptif yaitu metode menganalisis data atau informasi yang telah terkumpul untuk menggambarkan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Proses analisis dapat dilakukan melalui 3 tahap, antara lain :

1. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum. Memilih hal – hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2010). Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan akan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait efektivitas penerapan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dalam pengurusan dokumen kepegawaian pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Semua data yang telah disajikan di dalam penelitian ini diperoleh sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di lapangan.

3. Menarik Kesimpulan

Tahap akhir dari analisa data adalah penarikan kesimpulan setelah semua data dan informasi telah didapatkan kemudian disajikan di dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan penelitian dilakukan dengan melihat reduksi dan tetap mengacu pada perumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah didapatkan kemudian disusun dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lain sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap permasalahan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis bertempat di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Jl. Hang Tuah Ujung No. 148, Sialang Sakti, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28281

4.2 Gambaran Umum Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Adapun gambaran umum mengenai Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, sebagai berikut : (Sumber : Pekanbaru.bkn.go.id, 2021)

4.2.1 Sejarah BKN Pekanbaru

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang pembentukan Kantor Regional X, XI, dan XII Badan Kepegawaian Negara. Berkaitan dengan itu berdasarkan keputusan BKN No. 106/KEP/2006 tanggal 31 Oktober 2006 telah ditetapkan Bapak Drs. Dede Djunaedhy, M.Si, NIP. 260003364 sebagai Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Regional III BKN Bandung. Pada tanggal 22 November 2006 diadakan pelantikan Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru oleh Gubernur Riau Bapak HM. Rusli Zainal bertempat di Kantor Gubernur Propinsi Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut, untuk menjalankan roda organisasi pada tanggal 4 Januari 2007 diadakan pelantikan para pejabat eselon III dan eselon IV oleh Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang bertempat di Balai Pelatihan Pegawai Propinsi Riau di Jln. Ronggo warsito No. 14 Pekanbaru. Kemudian setelah pelantikan pejabat tersebut secara operasional Kantor Regional BKN menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut di atas maka secara de yure hari jadi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah tanggal 29 Maret 2006, sedangkan secara de facto hari jadi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah tanggal 4 Januari 2007 dengan demikian dapat ditetapkan hari jadi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah tanggal 4 Januari 2007.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kanreg XII BKN pada mulanya didukung oleh 24 orang Pegawai dengan menempati Kantor yang berstatus pinjam pakai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau dalam kurun waktu 2 tahun yang beralamat di Jalan Hangtuh Ujung No. 346 Pekanbaru.

Wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru pada awal berdirinya meliputi dua propinsi yaitu Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau. Propinsi Riau meliputi 10 Pemerintahan Kabupaten dan 2 Pemerintahan Kota. Sedangkan Kepulauan Riau meliputi 5 Pemerintahan Kabupaten dan 2 Pemerintahan Kota.



Pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Regional X, XI dan XII Badan Kepegawaian Negara yang pada intinya berisi tentang bergabungnya Propinsi Sumatera Barat ke dalam wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Propinsi Sumatera Barat meliputi 12 Pemerintahan Kabupaten dan 7 Pemerintahan Kota. Dengan demikian wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru meliputi Propinsi Riau, Kepulauan Riau dan Propinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2008 direncanakan membangun gedung Kantor Regional XII BKN yang terletak di Jalan Hangtuah Ujung, Pekanbaru di atas tanah seluas 3,6 Ha. Disamping bangunan gedung Kantor telah berdiri bangunan Mess tahap pertama dua lantai dengan kapasitas 18 kamar. Disamping itu direncanakan pula akan dibangun 1 unit rumah Dinas Kepala Kantor dan 5 unit rumah Dinas Kepala Bagian/Bidang Kantor Regional XII BKN. Disamping itu juga Gedung Kantor Regional XII BKN dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti ATM, taman refleksi dan kolam pancing. Barulah pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 Kantor Regional XII BKN yang beralamat di Jl. Hang Tuah Ujung No. 148 Pekanbaru diresmikan oleh Kepala BKN dan Wakil Gubernur Riau yang secara resmi menggantikan kantor sementara yang sebelumnya ditempati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Visi, Misi dan Motto

Visi, Misi dan Motto

Visi :

“ Menjadi Pembina Dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian Yang Profesional Dan Bermartabat Tahun 2025 ”

Misi :

1. Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara
2. Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian
3. Mengembangkan Manajemen Internal BKN

Motto :

“ Kembangkan inovasi dan tingkatkan pelayanan “

4.2.3 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Kedudukan :

Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara disebut Kanreg BKN adalah instansi Badan Kepegawaian Negara di daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kanreg BKN dipimpin oleh seorang Kepala.

Tugas :

Kanreg BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah



kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis, dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- b. Pemberian pertimbangan, persetujuan, dan/atau penetapan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kedanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penetapan pensiun dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat di wilayah kerjanya;
- d. Penetapan pensiun dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi daerah di wilayah kerjanya;
- e. Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya;
- f. Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja dan penyusunan standar kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
- g. Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.4 Maklumat Pelayanan

Berupaya sungguh – sungguh untuk :

- a. Memberikan layanan kepegawaian dengan cepat, tepat dan aman
- b. Menyajikan informasi kepegawaian yang terkini (up to date)
- c. Menanggapi pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap pemberian layanan sesuai standar yang berlaku
- d. Memiliki perhatian, kepedulian, ikhlas dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan
- e. Menyediakan ruang dan fasilitas layanan yang nyaman, aman, dan rapi
- f. Menyiapkan petugas yang berpenampilan rapi, berdedikasi, dan siap melayani

4.2.5 Layanan

a. Mutasi

Bidang mutasi mempunyai tugas dalam melaksanakan pemberian persetujuan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya, serta pertimbangan teknis mutasi antar kabupaten/kota dalam provinsi, dan penetapan mutasi dari instansi pusat ke instansi daerah, serta penyiapan pertimbangan status kepegawaian di wilayah kerjanya.

Pada bidang mutasi dipimpin oleh seorang Kepala bidang, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Pelaporan Mutasi dan Status Kepegawaian, Kepala Seksi Mutasi Instansi Kabupatenf Kota, Kepala Seksi Mutasi Instansi Vertikal dan



Provinsi, Kepala Seksi Status Kepegawaian. Dalam penyelenggaraan pelayanan maka ditempatkan petugas yang sehari – hari akan bertugas dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing – masing.

Adapun layanan yang diberikan pada bidang mutasi yaitu :

1) Kenaikan pangkat

Kenaikan Pangkat adalah salah satu layanan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang telah memenuhi standar ISO 9001:2008. Layanan ini merupakan layanan Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian, dimana secara teknis Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian akan memberikan persetujuan atas usulan Kenaikan Pangkat PNS pada instansi Pusat maupun Daerah dari Juru Muda Tk. I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

2) Mutasi Lainnya

Layanan pemberian persetujuan teknis Peninjauan Masa Kerja (PMK), Pindah Wilayah Kerja (PWK) dan persetujuan pemberian cuti diluar tanggungan negara (CLTN) bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan daerah sampai dengan Pembina Tk. I golongan ruang IV/b merupakan layanan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kartu Identitas Pegawai Dan Keluarganya

Salah satu tugas Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian adalah melaksanakan penyiapan penetapan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami (KARIS/KARSU) bagi Pegawai Negeri Sipil.

b. Pengangkatan dan Pensiun

Bidang Pengangkatan dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, Penetapan Kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang telah mencapai batas usia pensiun dan atau meninggal dunia, Janda/Duda bagi pensiunan yang meninggal dunia serta pengelolaan tata naskah pensiun di wilayah kerjanya.

Pada bidang pengangkatan dan pensiun dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang dibantu oleh : Kepala Seksi Verifikasi Dan Pelaporan Pengangkatan Dan Pensiun, Kepala Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal Dan Propinsi, Kepala Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Instansi Kabupaten/Kota, Kepala Seksi Pengangkatan Aparatur Sipil Negara.

Adapun fungsi dari bidang pengangkatan dan pensiun yaitu :

- 1) Penyiapan penetapan Nomor Induk Pegawai untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Instansi Daerah di wilayah kerjanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penyiapan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Pada instansi Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pensiun janda/dudanya.
 - 3) Penyiapan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada instansi Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pensiun Janda/ Dudanya.
 - 4) Penyiapan pemberian persetujuan teknis pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada instansi Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.
 - 5) Penyiapan pemberian persetujuan teknis pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.
 - 6) Penetapan kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pusat dan instansi daerah.
- c. Informasi Kepegawaian
- Bidang informasi kepegawaian memiliki tugas dalam melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada instansi di wilayah kerjanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bidang informasi kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang dibantu oleh : Kepala Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Diseminasi Informasi Kepegawaian, Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Instansi Kabupaten/Kota, Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Instansi Vertikal dan Provinsi.

Adapun fungsi dari bidang informasi kepegawaian adalah :

- 1) Pengelolaan dan pemeliharaan basis data kepegawaian.
- 2) Pengelolaan dan pemeliharaan basis data penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 3) Pelaksanaan pengolahan data kepegawaian.
- 4) Pengelolaan dan pemeliharaan arsip kepegawaian.
- 5) Pelaksanaan penyuntingan dan penyandian data kepegawaian.
- 6) Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi sistem penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 7) Penyelenggaraan penyajian dan pertukaran informasi.
- 8) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian.

Layanan yang diberikan pada bidang informasi kepegawaian yaitu:

- a. Perbaikan Data Pns/Konversi NIP

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 Tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sipil, BKN telah melakukan konversi dari NIP lama menjadi NIP baru untuk seluruh PNS baik Pusat maupun PNS Daerah. Bagi PNS yang belum ditetapkan atau yang masih terdapat kesalahan konversi NIP, berdasarkan Peraturan Kepala BKN 43 tahun 2007 Tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN 14 tahun 2011 Tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan persyaratan sebagai berikut :

1. Penerbitan SK Konversi NIP Baru
2. Perbaikan Konversi NIP

4.2.6 Wilayah Kerja

Adapun Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, yaitu :

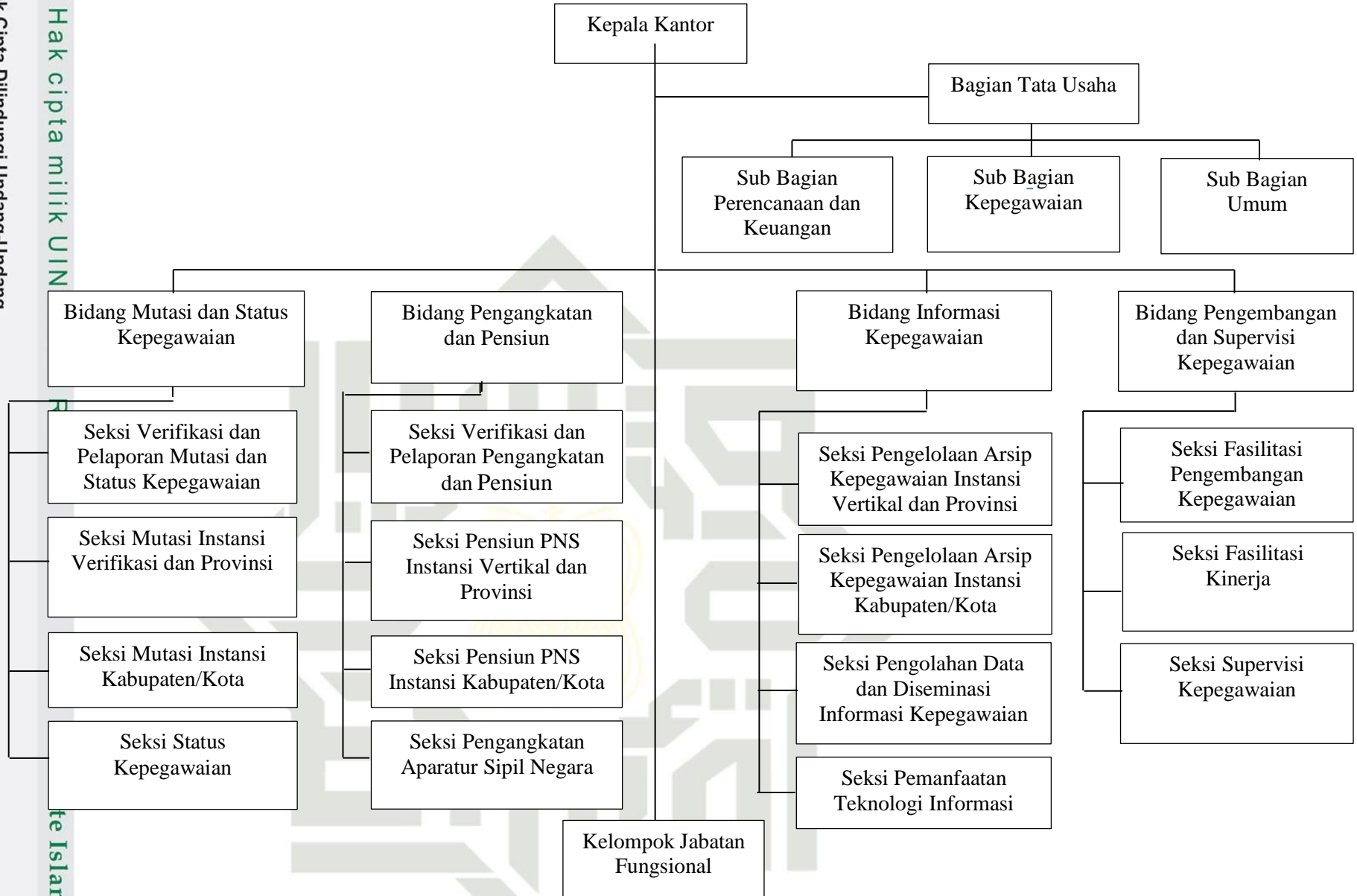
- 1) Provinsi Riau
- 2) Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Provinsi Sumatera Barat

4.2.7 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, Berikut adalah susunan organisasi Kantor Regional XII BKN.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru





Berikut penjelasan dari tabel diatas mengenai struktur organisasi pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru :

1. Kepala

Kepala kantor mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di wilayah kerjanya.

2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Bagian Tata Usah terdiri dari :

- a. Kepala bagian Tata Usaha,
- b. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan,
- c. Kepala Sub bagian Kepegawaian, Kepala Sub bagian Umum.

3. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian persetujuan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya, serta pertimbangan teknis mutasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, antar Kabupaten/Kota antar Provinsi, dan antar Provinsi, serta penyiapan pertimbangan status kepegawaian di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian terdiri dari :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala bidang Mutasi dan Status Kepegawaian,
 - b. Kepala seksi Verifikasi dan Pelaporan Mutasi dan Status kepegawaian,
 - c. Kepala seksi Mutasi Instansi Vertikal dan Provinsi,
 - d. Kepala seksi Mutasi Instansi Kabupaten/Kota, Kepala seksi Status Kepegawaian.
4. Bidang Pengangkatan dan Pensiun
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan nomor induk Pegawai Negeri Sipil penetapan kenaikan pangkat pengabdian dan anumerta, pemberhentian dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang telah mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia, Janda/Duda bagi pensiunan yang meninggal dunia serta pengelolaan tata naskah pensiun di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.
- Bidang Pengangkatan dan Pensiun terdiri dari :
- a. Kepala bidang Pengangkatan dan Pensiun,
 - b. Kepala seksi Verifikasi Dan Pelaporan Pengangkatan Dan Pensiun,
 - c. Kepala seksi Pensiun PNS Instansi Vertikal dan Provinsi, Kepala seksi Pensiun PNS Kabupaten/Kota,
 - d. Kepala seksi Pengangkatan Aparatur Sipil Negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bidang Informasi Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari :

- a. Kepala seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Instansi Vertikal dan Provinsi,
- b. Kepala seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Instansi Kabupaten/Kota,
- c. Kepala seksi Pengolahan Data Dan Deseminasi Informasi Kepegawaian,
- d. Kepala seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

6. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kepegawaian dan supervisi pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara instansi di wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian terdiri dari :

- a. Seksi fasilitasi Pengembangan Kepegawaian
- b. Seksi Fasilitasi Kinerja
- c. Seksi Supervisi Kepegawaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.7 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berjumlah 91 (Sembilan Puluh satu) pegawai per Juni 2021. Berikut jumlah Sumber Daya Aparatur di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 4.1
Rekapitulasi PNS Pada Kantor Regional XII Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Per Juni 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki - Laki	Perempuan		
1	Magister/S2	11	10	21	23%
2	Sarjana/S1	19	22	41	45%
3	Diploma IV/D.IV	1	1	2	2%
4	Diploma III/D.III	10	16	26	29%
5	Diploma II/D.II	0	0	0	-
6	Diploma I/D.I	0	0	0	-
7	SMA	1	0	1	1%
8	SMP	0	0	0	-
9	SD	0	0	0	-
Jumlah		42	49	91	100%

Sumber: Data Olahan Kanreg XII BKN Pekanbaru, 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 91 orang PNS pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, sebagian besar berpendidikan Sarjana/S1 sebanyak 41 orang atau sebesar 45%. Kemudian diikuti dengan yang berpendidikan Diploma III/D3 sebanyak 26 orang atau sebesar 29%. Jumlah PNS yang berpendidikan Magister/S2 sebanyak 21 orang atau sebesar 23%, jumlah yang berpendidikan Diploma IV/D4 sebanyak 2 orang atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar 2% dan jumlah yang paling sedikit yaitu yang berpendidikan SMA sebanyak 1 orang atau sebesar 1%.

Kemudian jumlah pegawai Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berdasarkan golongan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Jumlah PNS pada Kantor Regional XII Berdasarkan Golongan Per Juni 2021

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	II/c	1	1%
2	II/d	24	26%
3	III/a	14	16%
4	III/b	19	21%
5	III/c	9	10%
6	III/d	20	22%
7	IV/a	1	1%
8	IV/b	2	2%
9	IV/d	1	1%
Jumlah		91	100%

Sumber: Data Olahan Kanreg XII BKN Pekanbaru, 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa PNS dengan golongan II/d yang paling banyak yaitu berjumlah 24 orang atau sebesar 26%. Kemudian diikuti dengan PNS yang bergolongan III/d berjumlah 20 orang atau sebesar 22% dan Jumlah PNS yang bergolongan III/b sebanyak 19 orang atau 21%. Jumlah PNS dengan golongan III/a sebanyak 14 orang atau sebesar 16 % dan jumlah PNS dengan golongan III/c sebanyak 9 orang atau 10%. Jumlah PNS dengan golongan IV/b sebanyak 2 orang atau sebesar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2%. Dan yang paling sedikit yaitu jumlah PNS dengan golongan IV/a dan IV/d yaitu sebanyak 1 orang atau sebesar 1%.

Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan jabatan pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Berikut dibawah ini tabel rekapitulasi PNS berdasarkan jabatan.

Tabel 4.3

Rekapitulasi PNS Pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Berdasarkan Tingkat Jabatan Per Juni 2021

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Struktural	10	11%
2	Fungsional Tertentu	57	63%
3	Fungsional Umum	24	26%
Jumlah		91	100%

Sumber: Data Olahan Kanreg XII BKN Pekanbaru, 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah PNS dengan jabatan fungsional tertentu yang paling banyak yaitu sebanyak 57 orang dengan persentase 63%, kemudian diikuti dengan jumlah PNS yang berjabatan fungsional umum sebanyak 24 orang dengan persentase 26% dan jumlah PNS dengan jabatan struktural sebanyak 10 orang dengan persentase 11%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam pengurusan dokumen pegawai pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru serta untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam Pengurusan Dokumen Kepegawaian. Berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melihat efektivitas sistem aplikasi pelayanan kepegawaian menggunakan teori PIECES (*Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, and Service*), maka dapat disimpulkan bahwa:

6.1.1 *Performance* (Kinerja)

Dalam hal kinerja ini diukur dari *throughput* yaitu jumlah pekerjaan yang dapat dihasilkan, dan *response time* yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian kegiatan atau pekerjaan. Dapat disimpulkan dengan menggunakan SAPK dapat mempermudah dan mempercepat kinerja pegawai serta berdampak besar pada kinerja pegawai dalam pengurusan dokumen pegawai. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah pekerjaan yang dihasilkan dengan menggunakan SAPK dapat terselesaikan dengan sangat baik. Kemudian dari *response time*, dengan menggunakan SAPK waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan waktu yang lama. Dilihat dari kedua pengukuran pada kinerja dapat diketahui juga ada beberapa masalah yaitu permasalahan pada kinerja sistem yang akan terganggu karena terjadinya gangguan jaringan kemudian juga dari beberapa instansi yang terkadang belum mengerti dalam penggunaan SAPK dalam hal pengajuan usulan dan juga adanya berkas yang belum lengkap sehingga dapat menghambat kinerja Kanreg XII dalam memproses usulan yang masuk.

6.1.2 *Information* (Informasi)

Sebuah sistem dapat dikatakan baik apabila suatu sistem dapat menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan relevan. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) telah membuktikan bahwa sistem tersebut dalam pengurusan dokumen kepegawaian telah menghasilkan informasi yang cepat, akurat dan relevan.

6.1.3 *Economy* (Ekonomi)

Analisis terkait ekonomi akan dilihat dari apakah sistem tersebut dapat memberikan penghematan serta dapat memberikan keuntungan atau tidak bagi instansi yang menerapkan sistem tersebut. Awal penerapan SAPK pada modal awal memang mahal namun hal tersebut akan memperoleh keuntungan untuk kedepannya terutama terlihat dalam segi proses dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga dengan hal tersebut untuk kedepannya dapat menghemat biaya dibandingkan sebelum adanya SAPK.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian pada penerapan SAPK jika dilihat secara keseluruhan pengeluaran sebelum adanya SAPK lebih besar daripada setelah penerapan SAPK. Hal ini dikarenakan sebelum adanya SAPK semuanya dilakukan secara manual, sehingga banyaknya pengeluaran itu lebih ke dalam hal penggunaan kertas, print dan lain – lain. Dapat disimpulkan pada indikator ekonomi, dengan penerapan SAPK dapat memberikan penghematan serta keuntungan bagi instansi untuk kedepannya.

6.1.4 Control (Kontrol)

Pada penerapan SAPK telah dilengkapi adanya *user* dan *password* dan hanya pegawai yang telah terdaftar yang bisa memiliki akses dalam menjalankan sistem tersebut. SAPK dapat menjamin keamanan dalam menyimpan data – data pegawai karena telah terintegrasi dengan BKN Pusat sehingga data – data pegawai sudah tersimpan dan menjadi lebih aman. Kemudian adanya masalah sistem yang biasanya terjadi yaitu adanya *bug* dan juga server yang terkadang error. Selanjutnya mengenai evaluasi pada SAPK secara khusus tidak ada, evaluasi dilakukan hanya ketika ada permasalahan dalam sistem tersebut dan mengenai pembaharuan, SAPK terakhir kali dilakukan pembaharuan yaitu yang dulunya hanya bisa diakses melalui desktop sekarang sudah bisa diakses dimanapun dan pembaharuan pada sistem tersebut berkelanjutan.



6.1.5 Eficiency (Efisiensi)

Dilihat dari hasil analisis penulis, efisiensi sumber daya terutama sumber daya manusia, diketahui jumlah personil yang ada terbatas dan banyaknya jumlah beban usulan masuk tidak menghambat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya hal ini dikarenakan dibantu oleh SAPK sehingga dapat mempersingkat proses pengurusan dokumen kepegawaian. Selanjutnya pada ketersediaan sarana dan prasarana pada Kanreg XII sudah memadai sehingga dalam mengoperasikan SAPK dapat berjalan dengan baik dan menjadi lebih optimal. Selanjutnya pada efisiensi kinerja pegawai, dengan penerapan SAPK pada Kanreg XII dapat mempermudah kinerja pegawai dalam melakukan pekerjaannya dibandingkan sebelum adanya SAPK, dan dengan adanya SAPK kinerja pegawai menjadi lebih terpantau. Dan terakhir Efisiensi sebuah sistem, dengan adanya SAPK sudah tidak terjadinya lagi duplikasi data, hal ini dikarenakan data – data pegawai sudah tersimpan pada sistem tersebut, jika dibandingkan dengan sebelum adanya SAPK, semuanya dilakukan secara manual sehingga dokumen yang berisikan data pegawai tersebut memungkinkan terjadinya duplikasi data. Dengan adanya SAPK juga dapat mengurangi pemborosan kertas, karena pengurusan dokumen sudah dilakukan dengan menggunakan sistem.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.1.6 *Service (Layanan)*

Pada hasil analisis yang telah dilakukan penulis bahwa SAPK sangat mudah dipelajari dan tidak adanya kesulitan bagi pegawai dalam memahami dan mempelajari pengoperasian SAPK tersebut, dan juga para pegawai baru sudah tidak adanya sosialisasi dan pelatihan, sehingga pegawai tersebut belajar secara otodidak dan hanya dilakukan pendampingan. Kemudian analisis dilihat dari meningkatnya pelayanan, setelah menerapkan SAPK dalam pelaksanaan pelayanan kepada PNS dapat meningkatkan pelayanan secara optimal, hal tersebut dibuktikan dengan menggunakan SAPK pelayanan menjadi lebih cepat dan alur pelayanan pun tidak berbelit – belit, kemudian dilihat juga dari meningkatnya indeks kepuasan instansi/PNS terhadap layanan kepegawaian pada Kanreg XII. Selanjutnya dapat disimpulkan manfaat yang diperoleh dengan adanya SAPK bagi pelayanan dan yang mendapat pelayanan yaitu pelayanan menjadi lebih cepat dan yang mendapat pelayanan dapat mengetahui proses jalannya layanan tersebut sampai dimana.

Dari penjelasan diatas, maka Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam Pengurusan Dokumen Kegawaian Pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru secara keseluruhan sudah efektif dari segi kinerja, informasi, biaya, kontrol, efisien dan layanan dalam menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Namun juga yang harus diperhatikan dari beberapa indikator tersebut penulis menemukan



beberapa masalah dalam penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) tersebut yaitu masalah pada jaringan sehingga sistem dapat terganggu dalam pengoperasiannya, tidak hanya itu masalah sistem yang biasa terjadi yaitu adanya *bug*, dan juga server pada aplikasi MYSAPK sering error dan down. Kemudian ada beberapa instansi yang belum memahami proses pengoperasian SAPK sehingga menghambat kinerja Kanreg XII, tidak adanya pelatihan kepada pegawai baru dalam pengelola SAPK, tidak adanya evaluasi pada sistem sehingga ketika sistem bermasalah baru sistem tersebut diperbaiki.

Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan pada sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dalam pengurusan dokumen pegawai yaitu kelebihan pada SAPK diantaranya adalah dengan adanya SAPK informasi mengenai data kepegawaian yang diperoleh menjadi lebih akurat, dengan adanya SAPK pegawai dapat lebih cepat menginput berkas usulan yang masuk, dengan adanya SAPK pegawai dapat lebih mudah mencari dokumen kepegawaian saat diperlukan kembali, Efisiensi biaya terhadap perjalanan dinas, mempermudah aksesibilitas informasi, proses pelayanan menjadi lebih cepat, kinerja pegawai dan kinerja organisasi lebih terukur, dan SAPK dapat diakses dimana saja. Disamping terdapatnya kelebihan pada sistem ini tentunya terdapat kekurangan pada sistem tersebut diantaranya adalah terdapat beberapa Instansi yang SIMPEG nya belum terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) masih banyak yang belum terakomodir,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang penerapannya sudah berlangsung lama sehingga teknologinya pun sudah absolut.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan pada efektivitas penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam pengurusan dokumen kepegawaian pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan dalam menyempurnakan penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), sebagai berikut :

1. Untuk meminimalisir terjadinya gangguan sistem akibat kurang lancarnya jaringan internet maka hal perlu dilakukan yaitu dengan penambahan kapasitas kecepatan internet sesuai dengan kebutuhan, agar proses pelayanan pengurusan dokumen pegawai menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dapat berjalan dengan lancar
2. Perlunya koordinasi antara Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dengan instansi – instansi lainnya dalam proses integrasi antara SIMPEG dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), agar informasi mengenai data kepegawaian menjadi lebih *update*
3. Penggunaan sistem harus lebih ditingkatkan lagi dengan dilakukannya pelatihan – pelatihan, tidak hanya kepada pegawai lama namun kepada pegawai baru harus dilakukannya pelatihan agar pegawai tersebut mempunyai keterampilan dalam menggunakan SAPK dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkannya dengan baik. Sehingga dapat memaksimalkan pekerjaannya dalam pengurusan dokumen pegawai dengan menggunakan SAPK

4. Perlunya dilakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, agar terlihat adanya perkembangan pada sistem tersebut atau tidak
5. Diperlukannya pengembangan serta pembaharuan pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, agar kinerja sistem tersebut lebih baik lagi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Alam, Nur, 2018, *Pengelolaan Arsip Kepegawaian Melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar*, Skripsi Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar

Al Fatta, Hanif, 2007, *Analisis Perancangan Sistem Informasi Untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*, Yogyakarta: ANDI

Arkunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta

Asyik, Muhammad Fandy, dkk, 2021, *Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat*, Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, Vol. 13 No. 1

Buku Panduan Kepegawaian 2019

Diani, Nur Rahma, 2017, *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Enrekang*, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government

Kasmi, Delpa Nopri dan Dadang Mashur, 2014, *Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian*, Jurnal Administrasi Pembangunan Universitas Riau, Pekanbaru

Lestari, Ni Putu, et.al, 2014 *Persepsi Pengguna Informasi tentang Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Pada PT. Adira Dinamika Multifinance, TBK Kantor Cabang Singaraja*, E-Journal SI AK Universitas Pendidikan Ganesha, Vo. 2 No.1

Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE

Makmur, 2010, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung : PT. Refika Aditama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Maslahah, Khoirul, 2011, *Analisis Sistem Informasi Perpustakaan IAIN Surakarta Dengan PIECES*, Jurnal EduLib, Vol. 1 No.1
- Muslim dan Larbiel Hadi, 2019, *Pelayanan Publik (Konsep, Inovasi, dan Semangat Anti Korupsi)*, Pekanbaru: Kreasi Edukasi
- Pekei, Beni, 2016, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, Jakarta Pusat: Taushia
- Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 tahun 2010 Tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas PNS, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan pemberian pensiun PNS, dan Perpindahan antar Instansi Berbasis SAPK secara Online.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
- Portal Badan Kepegawaian Negara : <http://www.bkn.go.id>
- Portal Kantor Regional XII BKN Pekanbaru : <http://pekanbaru.bkn.go.id>
- Putra, Sultan Kharisma & Mecca Arfa, 2016, *Analisis Pengelolaan Arsip Kepegawaian Dalam Proses Temu Kembali Arsip di Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol. 5 No. 3
- Rajil, Wukil, 2010, *Pedoman Sosialisasi Prosedur Operasi Standar*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ruslan, Rosady, 2013, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada
- Safitri, Vivi, 2012, *Pengukuran Efektivitas Sistem*, Jurnal Imiah MATRIK, Vol. 14 No. 3
- Saputra, Gusman & I Ketut Yadnyana, 2015, *Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer di Alfa Mart*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 13 No.3
- Seharmayanti, 2013, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, Bandung : Refika Aditama
- Setiati, Sidiq Budi & Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, 2021, *SAPK: Dapatkah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Efektif Memperbaiki Data Kepegawaian?, Jurnal Pusat Penelitian, Vol. XIII No. 11

- Sturawaji, 2009, *Corporate Social Responsibility dalam Praktek di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sudarmin, 2016, *Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur*, Tugas Akhir Program Magister Universitas Terbuka, Jakarta
- Sudaryono, 2019, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, Depok: Rajawali Pers
- Supriatna, Wasih dan Dwi Herlinda, *Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru*, Jurnal Niara Universitas Lancang Kuning, Vol. 9 No. 2
- Sugiyono, 2010, *Statistika untuk penelitian*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*, Bandung: Alfabeta
- Undang – undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 127 Tentang Sistem informasi Aparatur Sipil Negara
- Qahdina, dan Evayani, 2018, *Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada Hotel – hotel Berbintang di Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 3, No.1
- Wahyuni, Tri dan Durinta Puspasari, 2015, *Efektivitas Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Sebagai Kelancaran Penanganan Usulan Berkas Masuk Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional II Surabaya Jawa Timur*, Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran, Vol.3 No. 3
- Wimarno, Budi, 2014, *Kebijakan Publik*, Jakarta : PT. Buku Seru



DAFTAR WAWANCARA

Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Pengurusan Dokumen Kepegawaian Pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Performance

1. Apakah dengan adanya SAPK dapat menunjang kinerja pegawai dalam hal mempermudah dalam proses pengurusan dokumen kepegawaian?
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam penginputan berkas data kepegawaian dengan menggunakan SAPK?
3. Berapa lama waktu proses layanan yang diberikan dengan menggunakan SAPK?
4. Apakah ada permasalahan dalam menangani proses pengurusan dokumen

Information

1. Dibandingkan sebelum adanya SAPK, Apakah dengan adanya SAPK dalam pengurusan dokumen kepegawaian ini dapat menghasilkan informasi yang cepat, akurat dan relevan?
2. Informasi/output apa saja yang dikeluarkan dengan adanya pemanfaatan SAPK ini?
3. kepegawaian dengan menggunakan SAPK ini?

Untuk PNS yang menggunakan MY SAPK

1. Apakah bapak/ibu dalam menggunakan MYSAPK mudah dalam mendapatkan informasi yang cepat, akurat serta relevan terkait pengurusan dalam hal pengangkatan dan pensiun serta kenaikan pangkat?

Economy

1. Apakah dengan adanya SAPK dapat menghemat biaya dalam suatu organisasi dibandingkan dengan sebelum adanya SAPK ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dibandingkan sebelum adanya penerapan SAPK ini, mana yang lebih besar pengeluaran biaya sebelum atau sesudah adanya penerapan SAPK?

Control

1. Apakah dengan penggunaan SAPK dalam pengurusan dokumen kepegawaian ini dapat menjamin keamanan sistem dalam menyimpan data – data pegawai?
2. Apakah adanya permasalahan dalam SAPK?
3. Apakah adanya evaluasi dan pembaharuan pada SAPK?

Untuk PNS yang menggunakan MY SAPK

1. Menurut bapak/ibu apakah dalam MYSAPK ini dapat menjamin keamanan data – data PNS?
2. Apakah adanya masalah pada aplikasi MYSAPK?

Efficiency

1. Apakah dengan adanya SAPK kinerja menjadi lebih efisien?
2. Sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan untuk menjalankan SAPK?
3. Apakah setelah diterapkan SAPK ini dapat sepenuhnya menghilangkan duplikasi data? Atau masihkah terjadinya duplikasi data walaupun sudah diterapkannya SAPK? Yang mana kita ketahui sebelum adanya SAPK masih banyaknya terjadi duplikasi data
4. kepegawaian dengan menggunakan SAPK ini?

Service

1. Apakah pengguna/user dapat dengan mudah dalam mempelajari, memahami dan menggunakan SAPK?
2. Apakah ada pelatihan kepada pegawai dalam penerapan SAPK ini?
3. Apakah adanya sosialisasi dalam pemanfaatan SAPK di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam pelaksanaan pelayanan apakah dengan adanya penerapan SAPK dapat meningkatkan pelayanan secara optimal?
5. Dalam pengurusan dokumen kepegawaian apakah masih dilakukan secara manual atau sudah sepenuhnya dilakukan dalam SAPK?
6. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya SAPK bagi pengguna maupun dari pelayanan yang diberikan?

Untuk PNS yang menggunakan MY SAPK

1. Apakah bapak/ibu mudah memahami dalam menggunakan aplikasi MYSAPK?
2. Apakah ada hambatan dalam penggunaan aplikasi MYSAPK?
3. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kantor Regional XII BKN Pekanbaru?

Apa saja kelebihan dan kekurangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru?

DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Wawancara dengan Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun, Bapak Wisudo beserta Bapak Rahmat Fajri dan Ibu Ivo Afrimadona selaku *User* SAPK Pada 06 Mei 2021



Gambar 1.2 Wawancara dengan Kepala Seksi Verifikasi dan Pelaporan Mutasi dan StatusKepegawaian, Bapak Junaedi Pada 06 Mei 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.3 Wawancara dengan Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Bapak Andri Febrian Pada 06 Mei 2021



Gambar 1.4 Wawancara dengan PNS yang menggunakan MYSAPK, Ibu Isnawati Pada 21 September 2021



Gambar 1.5 Wawancara dengan PNS yang menggunakan MYSAPK, Bapak Akbar Maulana, Pada 22 September 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/245/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 19 Januari 2021 M
5 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada
Yth. **Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Venticar Cardea
NIM : 11775200939
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Pengurusan Dokumen Pegawai Pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

a. Tergantungannya untuk kepentingan penunjang, pemenuhan, pelaksanaan karya ilmiah, penyusunan laporan, penunjang atau terapan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/423/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 22 Januari 2021 M
8 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ventica Cardea
NIM. : 11775200939
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
Dalam Pengurusan Dokumen Pegawai pada Kantor Regional XII BKN
Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan
bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muhsaid HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512-198903 1 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/39134
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/423/2021 Tanggal 22 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

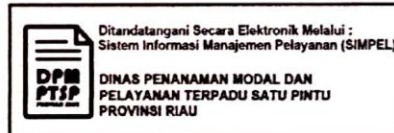
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : VENTICA CARDEA |
| 2. NIM / KTP | : 11775200939 |
| 3. Program Studi | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) DALAM PENGURUSAN DOKUMEN PEGAWAI PADA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini bertanggung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dian suatu masalah.

Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

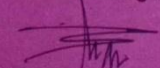
NAMA MAHASISWA : Ventica Cardea

NIM / SMT : 11775 200 939 / VIII (Delapan)

JUDUL SKRIPSI : Efektifitas Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kependidikan (CSAPP) Dalam Pengurusan Dokumen

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	17 juni 2021	Pedoman wawancara dan daftar data sekunder	h.
2.	21 juni 2021	Parasumber/informan yg tepat atau menguasai masalah penelitian	h.
3.	23 juni 2021	Data ^{oo} pada bab IV	h.
4.	30 juni 2021	Bab V Perbaiki Data ^{oo} temuan penelitian (wawancara, dokumen)	h.
5.	01 juli 2021	bab V. Penulisan dan sistematika bab V. analisa hasil penelitian	h.
6.	05 juli 2021	bab V analisa menggunakan teori	h.
7.	12 juli 2021	Perbaiki bab V. dibuat sistematis sesuai indikator	h.
8.	15 juli 2021	Perbaiki kalimat pengelompokan pada bab V	h.
9.	21 juli 2021	Penulisan diperbaiki analisa penulisan pada bab V	h.
10.	22 juli 2021	Abstrak, kata p., Daftar isi, Tabel	h.
11.	26 juli 2021	Gambar	h.
12.	28 juli 2021	ACC diujikan	h.

NB : Kartu ini dilampirkan oleh mahasiswa pada waktu meminta persetujuan Kajur untuk mengikuti ujian Skripsi

Pekanbaru, 28-7-2021
Pembimbing I

M. Muhammad Akhadari
NIP/NIK



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama **Ventica Cardea**. Lahir pada tanggal 08 Agustus 1998 di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Lahir dari pasangan Ayahanda Ismed dan Ibunda Nelly Rosma Dewita yang merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis menjalani pendidikan dasar di SDN 05 Perawang pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Tualang dan tamat pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 5 Tualang dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 melalui jalur PBUD diterima menjadi mahasiswi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada bulan Januari sampai Februari tahun 2020 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Kemudian pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Penulis mengikuti Ujian Seminar Proposal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020. Dan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 dinyatakan **LULUS** dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial melalui Sidang Munaqasah Program Studi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.